

**PERAN KEPEMIMPINAN DALAM SINERGI ANTAR DINAS
DI PEMERINTAHAN DAERAH: STUDI PROGRAM PERCEPATAN
PENINGKATAN STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN
DESA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**THE ROLE OF LEADERSHIP IN THE SYNERGY BETWEEN LOCAL GOVERNMENT
AGENCIES: A CASE STUDY OF THE PROGRAM FOR THE ACCELERATION OF
VILLAGE DEVELOPMENT PROGRESS AND INDEPENDENCE IN WEST KALIMANTAN
PROVINCE**

^{*1}*Siti Fatmawati*, ²*Pande Made Kutaneegara*, ³*Subando Agus Margono*

¹Program Studi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta

²Departemen Antropologi : Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

³Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik : FISIPOL, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta

Submitted: 25-01-2021; Revised: 17-05-2021; Accepted: 01-07-2021

ABSTRACT

The role of leadership has been seen critical in the success of achieving the goals of the organization. Leadership is manifested through the leaders' competence and capability. In this perspective, many see the value of transformational leadership in implementing the program for promoting independent village program. The role of transformational leaders has become a key factor in bringing regional progress. The West Kalimantan Province is an example of the critical role a transformational leader as manifested at least by a Governor of West Kalimantan in his role between different government agencies (SKPD) in the independent village program. Based on the case study of West Kalimantan, This research aims to examine the role of the leadership role of the Governor of West Kalimantan in the independent village program. The research used a qualitative approach with case studies. Data are collected through structured interviews and document review and field observations. Some of the informants involved were officials in the West Kalimantan Provincial Government. The results showed that the leadership role of the Governor of West Kalimantan has succeeded in increasing the status of an independent village. The success of the independent village program has become a top priority as stated in the Governor's Decree. The Governor's involvement in building synergies between SKPDs has shown a spirit of transformational leadership that can be demonstrated as an innovator, motivator, facilitator and mobilizer.

Keywords: *transformational leader; independent village; synergy; SKPD.*

*Corresponding author: sitifatmawati@mail.ugml.ac.id.

Copyright© 2021 THE AUTHOR (S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. Jurnal Kawistara is published by the Graduate School of Universitas Gadjah Mada

ABSTRAK

Peran Kepemimpinan dipandang secara kritis dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang dipimpinnya. Kepemimpinan diwujudkan melalui kemampuan, memimpin kompetensi dan kapabilitasnya. Dalam perspektif ini, banyak hal yang di lihat dalam menilai kepemimpinan transformasional sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan program melalui program desa mandiri. Peran pemimpin transformasional menjadi faktor kunci dalam membawa kemajuan wilayah. Provinsi Kalimantan barat, menjadi contoh nyata betapa pentingnya peran seorang pemimpin transformasional yang ditunjukkan oleh Gubernur Kalimantan Barat dalam perannya dalam SKPD untuk program desa mandiri. Melalui studi kasus di Kalimantan Barat, penelitian ini bertujuan untuk menguji peran kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat dalam program desa mandiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan telaah dokumen serta observasi lapangan. Beberapa informan yang terlibat adalah Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat telah berhasil meningkatkan status desa mandiri. Keberhasilan program desa mandiri telah menjadi prioritas utama yang tertuang dalam Keputusan Gubernur. Keterlibatan Gubernur dalam membangun sinergi antar SKPD telah menunjukkan semangat kepemimpinan transformasional yang dapat ditunjukkan sebagai inovator, motivator, fasilitator dan mobilisator.

Kata Kunci: *pemimpin transformasional; desa mandiri; sinergitas; SKPD.*

PENGANTAR

Pengembangan Indeks Desa Membangun (IDM) didedikasikan untuk memperkuat pencapaian sasaran pembangunan prioritas yaitu mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 Desa dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 Desa pada tahun 2019. Indeks Desa Membangun (IDM) meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan. Keberhasilan kepemimpinan di daerah menentukan suksesnya kepemimpinan nasional. Kepala

Daerah merupakan figur yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan daerah. Proses pemerintahan di daerah secara sinergis ditentukan oleh sejauh mana efektivitas peran yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Dalam menentukan arah dan tujuan organisasi pemerintah daerah ditentukan oleh kemampuan, kompetensi dan kapabilitas Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi, manajerial, kepemimpinan, serta pembinaan dan pelayanan yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah.

Pergantian kepemimpinan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Barat periode 2018-2023, dengan komitmen melaksanakan visi "*Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan*" menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana aman dan damai. Seiring dengan komitmen Gubernur Kalimantan Barat sebagai Kepala Daerah periode 2018-2023, berbagai program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan status kemandirian desa telah diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Upaya peningkatan status kemandirian desa menjadi sangat strategis yang memerlukan upaya dari semua pihak. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan prasarana dan sarana, pengembangan potensi ekonomi lokal. Serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Atas dasar tersebut, Gubernur Kalimantan Barat berupaya dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat meningkatkan jumlah status kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Gubernur

Kalimantan Barat menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Peraturan

Gubernur ini bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengubah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal menjadi desa berkembang serta dari desa berkembang dan desa maju menjadi desa mandiri.

Tabel 1
Perbandingan Status Desa di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2018, 2019, 2020

No.	Status Desa	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Sangat Tertinggal	677	33,33	208	10,24	12	0,59
2.	Tertinggal	928	45,69	781	38,45	566	27,87
3.	Berkembang	372	18,32	767	37,76	907	44,66
4.	Maju	53	2,61	188	9,26	332	16,35
5.	Mandiri	1	0,05	87	4,28	214	10,54
Total		2.031	100	2.031	100	2.031	100

Sumber : Diolah dari Kep. Dirjen PPMD Kemendes PDTT RI Nomor 52 Tahun 2018, Kep. Dirjen PPMD Kemendes PDTT RI Nomor 201 Tahun 2019, dan Kep. Dirjen PPMD Kemendes PDTT RI Nomor 303 Tahun 2020.

Sejauh ini, program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Barat sudah dikatakan berhasil. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari jumlah Desa Mandiri yang mengalami peningkatan yang signifikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu 1 (satu) Desa Mandiri di tahun 2018, 87 (delapan puluh tujuh) Desa Mandiri di tahun 2019 dan 214 (dua ratus empat belas) Desa Mandiri di tahun 2020. Hal ini melampaui target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2018-2023.

Keberhasilan program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Barat, tidak terlepas dari kerja keras Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun dan Tim Sinergi Program dan Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya sesuai amanah yang telah ditetapkan dalam SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 222/DPMD/2019 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Barat SKPD yang tergabung dalam tim tersebut

berkerja secara bersinergi untuk memenuhi indikator-indikator indeks desa membangun yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sesuai dengan tupoksi SKPD masing-masing. Dengan adanya peningkatan jumlah status desa mandiri di Provinsi Kalimantan Barat, menunjukkan komitmen yang baik dari kepemimpinan Kepala Daerah dalam melaksanakan program pemerintah pusat di daerahnya. Keberhasilan Gubernur Kalimantan Barat dalam meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sendiri, tidak dapat terwujud jika tidak didukung oleh berbagai pihak secara sinergi. Sinergi tidak akan terwujud jika tidak ada peran kepemimpinan didalamnya.

Oleh karena secara faktual bertambahnya desa mandiri dalam kurun waktu yang singkat meningkat secara signifikan, maka penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Riset ini akan memfokuskan kajiannya terhadap peran kepemimpinan

khususnya Gubernur Kalimantan Barat sebagai Kepala Daerah dalam membangun sinergi antar SKPD yang terlibat sebagai Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Barat dan Tim Sinergi Program dan Kegiatan Provinsi Kalimantan Barat sehingga program percepatan dan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Barat terlaksana dengan baik.

Berangkat dari latar belakang bahwa keberhasilan pelaksanaan program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Barat salah satunya didukung oleh sinergitas antar SKPD yang terlibat dalam Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun dan Tim Sinergi Program dan Kegiatan di Provinsi Kalimantan Barat, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana peran kepemimpinan Gubernur mempengaruhi sinergitas antar SKPD melalui program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Gubernur Kalimantan Barat dalam sinergitas antar SKPD, serta mengetahui keberhasilan program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa melalui sinergitas antar SKPD yang terbangun pada Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun dan Tim Sinergi Program Dan Kegiatan Provinsi Kalimantan Barat.

Kepemimpinan merupakan sebuah konsep yang sangat luas. Berbagai teori telah dikembangkan untuk membahas kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata "pemimpin" yang berarti membimbing atau tuntun. Kemudian lahirlah kata kerja "memimpin" yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda "pemimpin" yaitu orang yang berfungsi memimpin, orang yang membimbing atau menuntun (Charles, 1994). Untuk menjadi pemimpin yang baik, lebih berfokus pada keterampilan dan kemampuan daripada kualitas pribadi dan karakteristik perilaku. Sebuah pemimpin yang baik melalui proses belajar mandiri, pendidikan, pelatihan dan pengalaman (Uzohue et al., 2016). Literatur kepemimpinan semakin kaya setiap harinya

(Cetin, 2012), namun dalam hal ini masih sulit untuk mendefinisikan kepemimpinan atau menentukan karakteristik utama para pemimpin (Öztürk et al., 2017). Akan tetapi literatur kepemimpinan juga mengungkapkan bahwa teori telah disempurnakan dan dimodifikasi dengan berlalunya waktu dan tidak ada teori yang sama sekali tidak relevan dengan kepemimpinan saat ini (Z. A. Khan et al., 2016).

Wirawan (2013) mengungkapkan, walaupun pada organisasi yang berbeda-beda, secara umum kepemimpinan mempunyai fungsi yang sama, yaitu (1) menciptakan visi, (2) mengembangkan budaya organisasi, (3) menciptakan sinergi, (4) menciptakan perubahan, (5) memotivasi para pengikut, (6) memberdayakan pengikut, (7) mewakili sistem sosial, (8) manajer konflik, dan (9) membelajarkan organisasi. Yukl (2013) mengungkapkan dalam kepemimpinan terdapat komponen yang saling berkaitan yaitu pemimpin, dipimpin dan situasi. Efektifitas pemimpin terkadang diukur dalam hal kontribusi seorang pemimpin terhadap kualitas proses kelompok, seperti yang dirasakan pengikut atau pengamat luar. Adapun tiga jenis variabel yang relevan dalam memahami efektifitas kepemimpinan meliputi (1) karakteristik pemimpin, (2) karakteristik pengikut, dan (3) karakteristik situasi. Terdapat beberapa teori tentang karakteristik kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli (U. R. Khan et al., 2016). Sebagian besar teori kepemimpinan menjelaskan tentang kepemimpinan yang efektif dan karakteristik pemimpinnya (Yukl, 2013).

Kepemimpinan transformasional merupakan pendekatan gaya kepemimpinan yang terbaru dan paling populer (Northouse, 2016) dan merupakan hasil pengembangan pemikiran beberapa teoritis kepemimpinan (Wirawan, 2013). Kepemimpinan transformasional dapat diartikan sebagai pendekatan kepemimpinan yang menyebabkan perubahan pada individu dan sistem sosial sehingga meningkatkan motivasi, moral dan kinerja pengikut melalui berbagai mekanisme (George, 2006). Pertama kali diperkenalkan oleh James McGregor

Burns tahun 1979, istilah kepemimpinan transformasional dikembangkan oleh Benard M. Bass pada tahun 1985 (Wirawan, 2013).

Tambunan (2015) menjelaskan, menurut Giffin (2004), kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang melampaui ekpektasi-ekpektasi biasa dengan cara menanamkan *sense of mission*, menstimulasi pengalaman pembelajaran, dan mengilhami pola pikir-pola pikir baru. Sedangkan Robbins (1996) menyebutkan pemimpin transformasional adalah pemimpin yang memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang diindividualkan dan yang memiliki kharisma. Bernard M. Bass menyatakan kepemimpinan transformasional merupakan upaya pemimpin mentransformasi para pengikut dari satu tingkat kebutuhan rendah hierarki kebutuhan ke tingkat kebutuhan lainnya yang lebih tinggi menurut teori Abraham Maslow (Wirawan, 2013). Sedangkan menurut John M. Ivancevich (2006), ciri-ciri kepemimpinan transformasional adalah (1) Karisma, (2) Perhatian Individu, dan (3) Stimulasi Intelektual. Pemimpin transformasional akan berkomitmen untuk menciptakan sinergi dalam lingkaran pengaruh mereka sehingga tingkat baru kesuksesan sosial, ekonomi, organisasi dan spiritual dapat dicapai (Rees, 2001). Masih menurut Rees (2001), untuk menciptakan sinergi dalam organisasi, kepemimpinan transformasional memiliki prinsip-prinsip penyederhanaan, motivasi, fasilitasi, inovasi, mobilisasi, persiapan dan penentuan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Creswell dalam Sugiyono (2017) penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah

membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel.

Untuk pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan pendekatan penelitian mendalam dan deskriptif yang intensif terhadap seorang individu, sekelompok orang, dan organisasi berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan. Yin (2002) dalam Prihatsanti et al. (2018) mengatakan bahwa studi kasus adalah penyelidikan empiris yang menunjukkan fenomena kontemporer ('kasus') dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas-batas antara fenomena dan konteks mungkin tidak jelas terlihat. Selanjutnya Yin mengatakan pendekatan studi kasus digunakan dengan pertimbangan bahwa (a) fokus penelitian untuk menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa"; (b) peneliti tidak dapat memanipulasi perilaku mereka yang terlibat dalam penelitian; (c) peneliti ingin menutupi kondisi kontekstual karena yakin hal tersebut relevan dengan yang diteliti; (d) batas yang tidak jelas antara fenomena dan konteks (Prihatsanti et al., 2018).

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yang mulai tahun 2018 memfokuskan arah kebijakan pembangunannya pada program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa. Objek yang akan diteliti adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Barat ini. Kepala Daerah yang dimaksud yaitu Gubernur Kalimantan Barat Periode 2018-2023, Bapak Sutarmidji, S.H.,M.Hum. Sedangkan SKPD yang terlibat langsung pada program tersebut adalah yang tergabung dalam Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Barat dan Tim Sinergi Program dan Kegiatan Provinsi Kalimantan Barat.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi pelaksanaan program percepatan

peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari hasil studi literatur baik berupa teori-teori serta hasil penelitian terdahulu. Untuk studi dokumentasi diperoleh dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa.

Terkait dengan dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara yang terstruktur. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *non probability sampling* dimana pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel yang digunakan adalah *purposive* dan *snowball sampling* (Sugiyono, 2017).

Dalam melaksanakan program Percepatan Peningkatan Status Kemandirian dan Kemandirian Desa Provinsi Kalimantan Barat agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka dibentuklah Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Barat. Adapun susunan keanggotaan tim tersebut terdiri dari 4 orang pejabat kepala daerah yaitu Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian terdapat 27 SKPD yang terlibat dalam program percepatan kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, dibentuk juga Tim Sinergi Program dan Kegiatan Percepatan Status Kemandirian dan Kemandirian Desa Provinsi Kalimantan Barat dengan susunan keanggotaan Tim terdiri dari Wakil Gubernur, Sekertaris Daerah, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat serta 6 SKPD didalamnya.

Peneliti memilih informan secara *purposive* dari Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun dan Tim Sinergi Program Dan Kegiatan yang sudah dibentuk. Peneliti juga memperhatikan keterlibatan informan tersebut pada program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa. Informan utamanya yaitu Bapak Sutarmidji selaku

Gubernur Kalimantan Barat yang diteliti mengenai perannya sebagai pemimpin kepala daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian pejabat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yaitu Wakil Gubernur dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Selanjutnya SKPD yang terlibat sebagai *leading sector* pada program ini seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya informan dipilih secara acak dari SKPD yang terlibat dalam kedua tim secara *snowball* hingga titik jenuh.

Karena data yang diperoleh merupakan data kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan belum memiliki pola yang jelas. Sehingga analisis data dilaksanakan melalui proses mencari dan menyusun data secara sistematis, baik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi untuk diorganisasikan ke dalam kategori, dijabarkan dalam unit-unit, menyusun dalam pola, melakukan sintesa hingga membuat kesimpulan (Sugiyono, 2017).

PEMBAHASAN

Kepemimpinan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Gubernur dan Wakil Gubernur. Saat ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 merupakan hasil pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 27 Juni 2018 dan sudah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 5 September 2018 di Istana Negara. Masa jabatan Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 merupakan periode lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD dikemukakan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Barat adalah "Kalimantan Barat Bersatu dan Maju". Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 berkomitmen melaksanakan kepemimpinannya dalam mewujudkan visi tersebut. Oleh karena itu, visi pembangunan daerah tahun 2018-2023 yaitu: "Terwujudnya

Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan" (RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023, 2019). Artinya, dalam 5 (lima) tahun mendatang, kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dan melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Salah satu misi yang disampaikan yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera, mengandung makna bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat dimulai dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan. Sedangkan tujuan dari misi ini adalah meningkatkan perekonomian masyarakat yang merata yang ditandai dengan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, nilai tukar petani (NTP) dan jumlah Desa Mandiri. Adapun untuk mencapai indikator tujuan tersebut, telah ditetapkan beberapa strategi yang dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah. Salah satunya dengan Program Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), status kemajuan dan kemandirian desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan desa menjadi lebih maju dan mandiri. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana,

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Program Percepatan Peningkatan Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa merupakan tindak lanjut dari misi Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dengan meningkatkan jumlah Desa Mandiri di Provinsi Kalimantan Barat. Sebagian besar penduduk Kalimantan Barat berada di desa, sehingga arah pembangunan akan lebih tepat sasaran jika dilakukan dari desa. Apabila sebuah desa dapat meningkatkan status dari yang sebelumnya disandang, otomatis masyarakat desa akan sejahtera.

Berangkat dari wawasan global Gubernur Kalimantan Barat yang memahami bahwa negara-negara maju ditopang oleh dua kondisi utama, yaitu infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik. Maka Gubernur Kalimantan Barat memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, karna dilihat dari data-data yang ada sebelumnya, Provinsi Kalimantan Barat menempati urutan ke 33 (dari tiga puluh tiga provinsi) segi infrastruktur. Hal tersebut sangat sulit diwujudkan jika hanya mengharapkan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saja. Kemudian Gubernur Kalimantan Barat mengetahui bahwa ada program dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang membangun desa dengan kategori-kategori desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri. Ada kategori indeks dalam penilaian dan penentuan kategori desa tersebut yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan. Oleh sebab itu, Gubernur Kalimantan Barat berinisiatif melaksanakan Program Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa tersebut melalui kolaborasi sinergitas dengan pemangku kepentingan yang lain, yaitu TNI, POLRI, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, pengusaha serta LSM. Masing-masing pihak diwajibkan membangun sesuai dengan kewenangan tupoksinya.

Adapun seluruh desa di Provinsi Kalimantan Barat didata status dan kondisinya, kemudian dibuat skala prioritas pembangunan

dari desa-desa tersebut. Dan dari data yang sudah ada, menjadi acuan proses pembangunan seluruh pihak. Dalam Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Sendiri, dibentuklah Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 222/DPMD/2019 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Barat sebagai strategi percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa secara terpadu dan terakomodir melalui tim satuan tugas indeks desa membangun. ini secara aktif melaksanakan tugasnya sesuai uraian tugas yang sudah ditetapkan pada Keputusan Gubernur dimaksud. Selain itu, dalam rangka pemerataan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Barat khususnya pembangunan di desa, maka dibentuklah Tim Sinergi Program dan Kegiatan Percepatan Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1353/BAPPEDA/2019 tentang Pembentukan Tim Sinergi Program dan Kegiatan Percepatan Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Provinsi Kalimantan Barat.

Sinergitas Antar SKPD

Pelaksanaan program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Barat sejauh ini sudah dikatakan berhasil. Walaupun baru dilaksanakan secara intensif tahun 2019, namun sampai dengan akhir tahun 2020 sudah terdapat 214 desa mandiri di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini melampaui target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam RPJMD periode 2018-2023. Jumlah desa mandiri di Provinsi Kalimantan Barat juga menjadi yang tertinggi diantara provinsi-provinsi lain di Kalimantan.

Berhasilnya program akselerasi tersebut, terdapat unsur-unsur yang mendukung pelaksanaan program salah satunya adalah sinergitas antar SKPD pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Telah dibahas sebelumnya, untuk memfokuskan pelaksanaan program, Pemerintah Provinsi Kalimantan

Barat membentuk Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun dan Tim Sinergi Program Dan Kegiatan agar pelaksanaan program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa dapat dilaksanakan secara maksimal. Sinergitas antar SKPD yang dibangun perlu didukung oleh perangkat organisasi yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Barat. Dalam hal ini SKPD telah memberikan optimalisasi program dan kegiatan guna mendukung program tersebut. Strateginya adalah dengan pembagian kewenangan penanggungjawab peningkatan skor Indeks Desa Membangun (IDM) yang telah ditetapkan sesuai indikator-indikator yang ada. Pembagian kewenangan tersebut menghasilkan sinergi program dan kegiatan pada SKPD yang melaksanakannya.

Pada pembagian tugas dan wewenang yang dijalankan, secara keseluruhan SKPD yang terlibat dalam upaya percepatan desa mandiri ini lebih mematuhi aturan atau regulasi yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur. SKPD hanya menjalankan fungsi substansinya saja yang di koordinasikan oleh Bappeda. Beberapa SKPD yang terlibat dalam fungsi kerjasama ini secara implisit dan normative memberikan pandangan bahwa SKPD menjalankan fungsi dan peran atas aturan kementerian dalam negeri mulai dari rencana awal, hingga pelaksanaan dan evaluasinya semua sudah tertuang dalam regulasi yang telah di tetapkan. Pada aspek kerjasama ini beberapa SKPD memang terlihat melakukan bentuk kerjasama tidak hanya pada level provinsi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa misalnya, sudah jauh turun ke bawah pada level kabupaten untuk mengimplementasi program desa sejahtera mandiri tersebut pada level kabupaten.

Tugas koordinatif lebih tepat disematkan pada koordinasi antara SKPD di level provinsi. Dengan demikian pola relasi yang dikembangkan pada level provinsi lebih pada sinergi yang terbangun pada fungsi koordinatif antar lembaga yang dikoordinatori oleh Bappeda sebagai *leading* sektornya. Pada intinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini lebih pada pekerjaan teknis lapangan

dengan memberikan informasi terkait dengan desa, sejauh mana pencapaian dan program pemberdayaan yang akan di lakukan. Ada beberapa kendala yang di hadapi oleh SKPD dalam penyelenggaraan program percepatan desa mandiri ini. Kendala merupakan lingkup eksternal yang dibangun berupa lingkungan luar yang memberikan pengaruh secara signifikan terhadap proses berjalannya suatu program. Oleh karena itu maka aspek lingkungan ini lebih banyak mengungkapkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan program. Seperti yang di kemukakan oleh Dinas Perhubungan bahwa penegasan kendala lebih bersifat teknis dan perbedaan kesibukan dalam tupoksi utama namun hal tersebut dapat di selesaikan dengan ketersediaan alat dukung IT akan tetapi juga yang menjadi tantangan adalah perbedaan pemikiran yang tidak sama.

Peran Kepemimpinan

Dalam analisis kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat yaitu Bapak Sutarmidji, peran kepemimpinan yang dibangun oleh Gubernur Kalbar ini tentu akan memiliki karakteristik yang secara khas akan diungkap pada *proses bottom up*-nya. Analisis yang terperinci berkaitan dengan masalah keteladanan atau pun dedikasi. Sebelum masuk pada pokok utama akan dikaji produk hukum yang telah di hasilkan oleh Gubernur Kalimantan Barat berkaitan dengan program yang disegerakan dapat tertangani yaitu program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa atau percepatan desa mandiri. Produk unggulan yang digagas oleh Gubernur Kalimantan Barat yang membangun simpul kesejahteraan dimulai dari desa ke desa. Desa merupakan pilar utama dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakatnya di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Desa Mandiri selama periode kepemimpinannya menjadi hal yang penting untuk disegerakan dalam implementasinya. Pijakan hukum atau *legal standing* yang menjadi produk yaitu Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Keputusan Gubernur Nomor 222/DPMD/2019

tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Barat, Keputusan Gubernur Nomor 1352/DPMD/2019 tentang Pedoman Umum Rencana Aksi Daerah Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, serta Keputusan Gubernur Nomor 1353/BAPPEDA/2019 tentang Pembentukan Tim Sinergi Program dan Kegiatan Percepatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Provinsi Kalimantan Barat.

Kepemimpinan transformasional cukup melekat pada sosok seorang Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Sutarmidji. Kepemimpinan Transformasional sesungguhnya memiliki wibawa dan kharisma begitu melekat dengan *stimulasi intelektualnya* guna melakukan sebuah transformasi perubahan dan mengupayakan arah perbaikan bagi organisasi yang dipimpinnya. Peran kepemimpinan transformasional ini lebih mementingkan kebutuhan publik yang dipimpinnya tanpa lebih didominasi oleh sikap *imperative* dalam perintah yang cenderung bersifat *top down*. Peran kepemimpinan tentu tidak dapat dilepaskan visi yang dibuat oleh seorang pemimpin. Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Sutarmidji dalam visinya adalah "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan" yang kemudian diturunkan dalam beberapa misi yang dijalankan. Dalam visi tersebut jelas bahwa kesejahteraan menjadi *domain* utama yang dijalankan oleh Gubernur Kalimantan Barat melalui dua perangkat instrumen utama yaitu melalui pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Dua hal tersebut yang mendukung untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan barat. Dalam sebuah kutipan di media massa menjelaskan bahwa sebagai pemimpin di Kalimantan Barat dirinya berjanji tidak akan melakukan penyimpangan anggaran. Untuk itu dirinya juga memastikan tidak memberikan toleransi bagi aparaturnegara yang melakukan penyimpangan keuangan daerah.

Kepemimpinan Transformatif

Pemimpin dalam konteks sebagai inovator maka setidaknya harus bisa menumbuh-kembangkan prakarsa, mampu menangkap atau memahami melalui telaah staf yang dilakukan oleh bawahannya. Kemudian pemimpin sebagai motivator tentu harus memberikan motivasi dalam rangka membangkitkan semangat kerja kepada para bawahannya. Pemimpin sebagai fasilitator maka bagaimana kemudian Gubernur ini mampu memberikan dan mewujudkan kebutuhan fasilitasi dalam melakukan implementasi program terutama dalam mendukung visi dan misi Gubernur dalam merealisasikan harapan masyarakat Kalimantan Barat. Yang terakhir adalah seorang pemimpin sebagai mobilisator maka diharapkan pemimpin akan mampu menggerakkan dan mengarahkan terhadap tugas utama menjadi Gubernur kepada mekanisme kerja birokrasi dapat berjalan dengan baik dan terwujud sesuai yang dicita-citakan.

Dalam konteks **inovator**, terlihat dari program dan keinginan guna memberikan kesempatan terhadap SKPD untuk membangun budaya inovatif di lingkungan kerja Provinsi Kalimantan Barat. bahwa salah satu contoh program inovatif adalah desa mandiri tersebut. Hal tersebut merupakan bukti bahwa program desa mandiri merupakan bagian dari buah pembuktian Gubernur. Gubernur Suratmadji telah mengupayakan melalui agenda desa mandiri sebagai agenda *setting* kebijakan yang dirasa penting dan berupaya membangun *branding* inovatif dalam program kebijakan yang diambil. Konteks **motivator**, Seorang Gubernur Sutarmidji pun melontarkan berkaitan dengan pemilihan seorang pejabat sebisa mungkin dia tidak akan mengintervensi berkaitan dengan keterpilihannya. Secara obyektif dia tidak sekalipun melakukan upaya dan cara yang tidak benar. Pemilihan harus disesuaikan oleh ketentuan yang berlaku. Tidak ada yang namanya *kongkalingkong* antara peserta dengan penilai. Apa pun wujud ketidakbenaran tersebut. Sebagai **fasilitator**, pemimpin sedapat mungkin memberikan wadah dalam mewujudkan visi dan misi yang

telah digariskan. SKPD harus menjalankan apa yang telah menjadi garis kebijakan Gubernur dalam melaksanakan program yang telah dirancang. *Domain* perancangan ini ada pada Bappeda sebagai lembaga yang merencanakan dan mengevaluasi terhadap sinergi dan program yang telah di setujui antara Gubernur dan pihak legislatif (DPRD Provinsi). Diantara program yang menjadi indikator kinerja utama provinsi antara lain yaitu desa mandiri. Penegasan Gubernur mengupayakan bahwa desa mandiri menjadi salah satu indikator kinerja utama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maka program tersebut menjadikan *leading sector* oleh Bappeda sebagai koordinator pelaksanaannya. Sebagai mobilisator, pandangan seorang Gubernur Sutarmidji menyampaikan bahwa seorang pemimpin bekerja secara sistemik dan terencana dalam alokasi anggaran yang terdistribusi secara regulatif.

Penghargaan: Manifest Bukti Kerja Nyata dan Inovasi

Dua tahun telah berlalu sejak era kepemimpinan Gubernur dalam memimpin telah memberikan dampak bagi masyarakat Kalimantan Barat. Pada aspek internal Gubernur Kalimantan Barat secara internal memberikan penghargaan kepada 3 (tiga) desa yang dapat meningkatkan menjadi desa mandiri. Secara khusus dalam menciptakan desa mandiri yang di apresiasi oleh berbagai pihak. Secara eksternal pun Gubernur Kalimantan Barat juga mendapatkan penghargaan dari PT PLN Persero yang memberikan penghargaan atas dukungan serta kerjasamanya dalam kegiatan strategis ketenagalistrikan nasional yang diselenggarakan oleh PLN. Selain itu, penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai Provinsi Yang Paling Informatif tahun 2019. Predikat tersebut dikarenakan Kalimantan Barat merupakan provinsi paling informatif dari Badan Publik Nasional. Selain penghargaan sebagai provinsi yang informatif, Kalimantan Barat juga mendapat penghargaan di bidang pendidikan. Kalimantan Barat menerima penghargaan tersebut adalah Kategori Adhi Purna Prima Award bidang pendidikan yang

diterima oleh Provinsi Kalimantan Barat. Pada bidang agama juga Gubernur Kalimantan Barat telah mendapatkan penghargaan dari Menteri Agama dimana dalam era kepemimpinannya memberikan penghargaan yaitu yang memerikan hibah lahan seluas 23 hektar guna pembangunan Asrama Haji Kalimantan Barat. Hal ini sebagai salah satu bentuk penunjang penyelenggaraan haji di wilayah Kalimantan Barat sekaligus bentuk kepedulian pembinaan keberagamaan di Kalimantan Barat.

Perlu diketahui, bahwa sebelum menjadi Gubernur Kalimantan Barat ini, sosok Sutarmidji ini merupakan mantan Walikota Pontianak. Pada era menjadi Walikota tersebut Sutarmadji merupakan Walikota dengan tiga penghargaan yang luar biasa membanggakan yaitu pertama, Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah *Leadership Award* pada tahun 2017, kedua, penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif atau *Innovative Government Award 2017* serta ketiga, penghargaan *Local Government Capacity For Business Index 2017*.

Temuan hasil penelitian ini didapati bahwa peran kepemimpinan transformasional Gubernur Kalimantan Barat dapat mendorong sinergitas antar SKPD terhadap program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Barat. Peneliti mengukur kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat melalui pendekatan transformasional yang dikemukakan oleh Rees (2001) yaitu pemimpin sebagai inovator, pemimpin sebagai motivator, pemimpin sebagai fasilitator, dan pemimpin sebagai mobilisator.

Pemimpin dalam konteks sebagai inovator maka setidaknya harus bisa menumbuh-kembangkan prakarsa mampu menangkap atau mememahami melalui telaah staf yang di lakukan oleh bawahannya. Kemudian pemimpin sebagai motivator tentu harus memberikan motivasi dalam rangka membangkitkan semangat kerja kepada para bawahannya. Pemimpin sebagai fasilitator maka bagaimana kemudian Gubernur ini mampu memberikan dan mewujudkan kebutuhan fasilitasi dalam melakukan implementasi program terutama dalam mendukung visi dan misi Gubernur

dalam merealisasikan harapan masyarakat Kalimantan Barat. Yang terakhir adalah seorang pemimpin sebagai mobilisator maka di harapkan pemimpin akan mampu menggerakkan dan mengarahkan terhadap tugas utama menjadi Gubernur kepada mekanisme kerja birokrasi dapat berjalan dengan baik dan terwujud sesuai yang di cita-citakan.

Dari fakta-fakta yang didapat, memang benar adanya bahwa Gubernur Kalimantan Barat melaksanakan kepemimpinannya menggunakan prinsip transformasional tersebut, sehingga beliau dapat mensinergikan SKPD khususnya pada Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun dan Tim Sinergi Program dan Kegiatan untuk dapat melaksanakan program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa dengan sangat baik.

Sedangkan temuan lain membuktikan bahwa sinergitas yang terjadi antar SKPD pada Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun dan Tim Sinergi Program dan Kegiatan yang melaksanakan program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Barat berjalan sangat baik. Hal ini dikemukakan oleh seluruh narasumber yang diwawancarai. Gubernur Sutarmidji juga menyatakan bahwa tim tersebut sudah melaksanakan tugasnya dengan maksimal, yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah desa mandiri di Provinsi Kalimantan Barat melampaui target dalam RPJMD. Adapun unsur keberhasilannya dapat dilihat dari sumberdaya, koordinasi dan komunikasi yang dilakukan.

SIMPULAN

Berdasarkan pada uraian di atas hingga saat ini program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Barat sudah dikatakan berhasil. Desa Mandiri yang mengalami peningkatan yang signifikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu 1 (satu) Desa Mandiri di tahun 2018, 87 (delapan puluh tujuh) Desa Mandiri ditahun 2019 dan 214 (dua ratus empat belas) Desa Mandiri di tahun 2020. Keberhasilan program percepatan peningkatan status kemajuan dan

kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Barat, tidak terlepas dari kerja keras Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun dan Tim Sinergi Program dan Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya sesuai amanah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur yang telah ditetapkan. SKPD yang tergabung berkerja bersinergi untuk memenuhi indikator-indikator indeks desa membangun sesuai dengan tupoksi SKPD. Peran Kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat menjadi aktor utama suksesnya program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa melalui sinergitas antar SKPD di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional yaitu inovator, motivator, fasilitator, dan mobilisator. Keterbatasan dari penelitian ini adalah tidak terlibatnya sumber lain seperti pihak TNI, POLRI, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Perusahaan bahkan masyarakat sendiri dalam program desa mandiri ini yang bisa jadi memiliki perbedaan pandangan atau konteks permasalahannya, sehingga menjadi kajian menarik bagi peneliti lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cetin, S. (2012). Leadership in Public Sector: a Brief Appraisal. *DPUJSS, II*(32), 75-86.
- Charles, K. (1994). *Kepemimpinan, Teori dan Pengembangannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Fatria, J. (2020). Menteri Agama Beri Penghargaan Pada Sutarmidji. Kalbar Online 20 Januari 2021. <https://www.kalbaronline.com/2020/01/20/menteri-agama-beri-penghargaan-kepada-sutarmidji/>
- Fatria, J. (2019). Pemprov Kalbar Raih Penghargaan Adhi Purna Prima Award : Kado HUT ke-62. Kalbar Online 30 Januari 2019. <https://www.kalbaronline.com/2019/01/30/pemprov-kalbar-raih-penghargaan-adhi-purna-prima-award-kado-hut-ke-62/>
- Fatria, J. (2018). Nomor Urut Tiga dan Tiga Prestasi Bergengsi Yang Diraih Sutarmidji. Kalbar Online 16 Februari 2018. <https://www.kalbaronline.com/2018/02/16/nomor-urut-tiga-dan-tiga-prestasi-bergengsi-yang-diraih-sutarmidji/>
- George, W. (2006). Transformational Leadership. *Enterprise Transformation: Understanding and Enabling Fundamental Change*, 69-77. <https://doi.org/10.1002/0470007826.ch4>
- Hayat, N. (2019). Catatan Khusus, Setahun Kinerja Sutarmidji-Ria Norsan. Antara Kalbar 9 September 2019. <https://kalbar.antaranews.com/berita/390658/catatan-khusus-setahun-kinerja-sutarmidji-ria-norsan>
- Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 030 Tahun 2016. Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa. Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.
- Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 52 Tahun 2018. Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 030 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa. Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.
- Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 201 Tahun 2019. Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa. Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.

- Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2020. Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa. Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.
- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 222/DPMD/2019. Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1352/DPMD/2019. Tentang Pedoman Umum Rencana Aksi Daerah Percepatan Peningkatan Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1353/BAPPEDA/2019. Tentang Pembentukan Tim Sinergi Program dan Kegiatan Percepatan Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Khan, U. R., Ajaz, F., Khan, A., Khan, S., & Fatima, S. (2016). The Role of Leadership on Organizational Change. *International Journal of Management Sciences and Business Research*, 5(11), 88-95.
- Khan, Z. A., Nawaz, A., & Khan, I. (2016). Leadership Theories and Styles: A Literature Review. *Journal of Resources Development and Management*, 16 (January), 1-7. https://doi.org/10.1007/978-3-319-11107-0_4
- Mariana, D. (2020). Gubernur Kalimantan Barat Dapat Penghargaan dari PLN. *Kumparan.com* 14 November 2020. <https://kumparan.com/hipontianak/gubernur-kalimantan-barat-dapat-penghargaan-dari-pln-1uaRQr52MvQ/full>
- Northouse, P. G. (2016). *Leadership Theory And Practice. Seventh Edition*. United States of America Library : Sage Publications.
- Öztürk, A., Varoglu, M. A., & Varoglu, D. (2017). A Critical Review of Implicit Leadership Theory on the Validity of Organizational Actor-National Culture Fitness. *International Journal of Organizational Leadership*, 6(4), 456-469. <https://doi.org/10.33844/ijol.2017.60357>
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Pontianak : Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019. Tentang Percepatan Peningkatan Status Kemanjuaan Dan Kemandirian Desa. Pontianak: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016. *Tentang Indeks Desa Membangun*. Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.
- Prihatsanti, U., Suryanto, S., & Hendriani, W. (2018). Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi. *Buletin Psikologi*, 26(2), 126-136. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.38895>
- Saeno. (2019). Kalbar Raih Gelar Provinsi Paling Informatif 2019. *Bisnis.com* Kalimantan 21 November 2019. <https://kalimantan.bisnis.com/>

- read/20191121/407/1172967/kalbar-raih-gelar-provinsi-paling-informatif-2019
- Rees, E. (2001). *Seven Principles of Transformational Leadership -- Creating A Synergy of Energy™*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Tambunan, T. S. (2015). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Uzohue, C. E., Yaya, J. A., & Akintayo, O. A. (2016). A Review of Leadership Theories, Principles and Styles and Their Relevance to Educational Management of Health Science Libraries in Nigeria. *Journal of Educational Leadership and Policy*, 1(1), 17-26. <https://doi.org/10.5923/jmm.20150501.02>
- Viodeogo, Y. (2019). Berhasil Dongkrak Jumlah Desa Mandiri, Kalbar Dipuji Menteri Desa PDPT. *Bisnis.com Kalimantan* 17 November 2019. <https://kalimantan.bisnis.com/read/20191117/407/1171214/berhasil-dongkrak-jumlah-desamandiri-kalbar-dipuji-apresiasi-menteri-desa-pdtt>
- Wirawan. (2013). *Kepemimpinan : Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Yukl, G. (2013). *Leadership In Organizations . Eight Edition*. New York : Pearson.
- Yunanto, R. (2020). Berstatus Mandiri, 3 Desa di Kalbar Ini Raih Penghargaan Gubernur. *iNewsKalbar.id* 17 Desember 2020. <https://kalbar.inews.id/berita/berstatus-mandiri-3-desa-di-kalbar-ini-raih-penghargaan-gubernur>